



**Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah  
LKjIP  
2023**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN**  
Jl. Alun-alun Utara No. 1 Kajen 51161

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah ini dapat kami susun tepat waktu sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP. LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023. Tahun 2023 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, semoga laporan ini bermanfaat.

Kajen, 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

  
M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197507101999031008

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga/Instansi. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 dengan menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Daerah telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Program. Sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 3 (tiga) indikator kinerja dan Keberhasilan Program diukur menggunakan target kinerja pada 11 (sebelas) Indikator kinerja.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dari dua sasaran strategis yang terdiri dari 3 indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, seluruh Sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Sekretariat Daerah, yaitu Nilai SAKIP Kabupaten, Tingkat Kematangan Organisasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten. Untuk Rata-rata Capaian Program Sekretariat Daerah dari 11 (sebelas) indikator adalah 98,99 %.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	(%)
1		2	3		4	5	6
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,56)	B (70)	B (66,56)*	95,09 %
2.		Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,33)	B (67)	B (64,89)	96,85%



NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	(%)
1		2	3		4	5	6
			Tingkat Kematangan Organisasi	S (29,48)	S (34)	S (36,50)	107,35 %
3.		Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83	84	83,44	99,33 %
<b>Rata – rata Capaian IKU</b>							99,65 %
<b>Rata – rata Capaian Indikator Sasaran</b>							101,18 %

\*Data Tahun 2022, LHE Tahun 2023 masih menunggu hasil dari MENPAN RB

Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan kegiatan dengan baik dan relevan dengan dokumen sasaran strategis.

Kajen, 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN / KBAR, S. Sos., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	1
B. Fungsi Strategis .....	2
C. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan .....	2
D. Sumber Daya Manusia ( SDM ) .....	4
E. Permasalahan Utama yang Dihadapi .....	5
F. Sistematisasi Penyajian .....	5
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	7
B. Perjanjian Kinerja .....	12
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Pengukuran Kinerja .....	17
C. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	19
D. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
D. Realisasi Anggaran .....	57
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Prestasi yang diraih.....	60
C. Hal – Hal yang Ingin Dicapai Ditahun Mendatan.....	61
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Pekalongan perlu penataan organisasi pemerintahan yang baik yaitu organisasi yang efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan dengan mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif, profesional, berkarakter, akuntabel dan dengan dukungan sistem mekanisme kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, diyakini mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang baik. Sejalan dengan RPJM Nasional yang pada nilainya menggarisbawahi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat dengan lebih produktif, profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna.

Penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Tugas Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja Sekretariat Daerah dalam tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 serta RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026, Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renja Perubahan Tahun 2023 terutama capaian sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. FUNGSI STRATEGIS**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, maka Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan pemerintah Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pembinaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
    - b) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan; dan
    - c) Sub Koordinator Otonomi Daerah Dan Kerjasama.
  2. Bagian Hukum, terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Perundang-undangan;
    - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum ; dan



- c) Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi.
  - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    - a) Subkoordinator Bina Mental Spiritual; dan
    - b) Subkoordinator Kesejahteraan Sosial
    - c) Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahi:
  - 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD
    - b) Sub Koordinator Perekonomian
    - c) Sub Koordinator Sumber Daya Alam
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Penyusunan Program;
    - b) Sub Koordinator Pengendalian Program; dan
    - c) Sub Koordinator Evaluasi Dan Pelaporan.
  - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
    - a) Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    - b) Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
    - c) Sub Koordinator Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
  - 1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
    - a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
    - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
    - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Dan Kelembagaan.
  - 2. Bagian Umum, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Peralatan.
  - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Protokol
    - b) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan
    - c) Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )

Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan per Desember 2023 berjumlah 152 orang, yang terdiri dari 150 Orang ASN dan 2 Orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah (orang)	Persentase (%)
		L	P	L	P		
1	SD	3	-	-	-	3	1,97%
2	SMP Sederajat	3	-	-	1	4	2,63%
3	SMA Sederajat	31	5	-	-	36	23,68%
4	D3	9	3	-	1	13	8,55%
5	S1	34	41	-	-	75	49,34%
6	S2	13	8	-	-	21	13,82%
7	S3	-	-	-	-	-	0 %
	<b>Jumlah (orang)</b>	93	57	-	2	152	100%
	<b>Persentase (%)</b>	61,18%	37,50%	-	1,32%	100%	

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 29 Desember 2023

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan di Sekretariat Daerah :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	4	-	4
2	Golongan II	29	6	35
3	Golongan III	46	48	94
4	Golongan IV	13	4	17
5	PTT		2	2
	Total	92	60	152

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 29 Desember 2023

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan di Sekretariat Daerah :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**  
**di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	4	1	5
2	Eselon III	6	1	7
3	Eselon IV		4	4

4	JFT	18	13	31
5	JFU	62	43	105
6	PTT		2	2
	Total	90	62	152

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 29 Desember 2023

## E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan perlu adanya pemecahan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain :

- a) Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara Optimal, misalnya, tenaga teknis di bidang perencanaan, tenaga pengkajian di bidang hukum, pengelolaan keuangan/akuntan, tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi, analisa jabatan/kepegawaian.
- b) Harapan masyarakat yang semakin tinggi atas pelayanan yang oleh unit – unit pelayanan sehingga memerlukan inovasi dalam pelayanan.
- c) Perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi.
- d) Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah.
- e) Peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah belum efektif baik antar sektor dan antar fungsi maupun internal dan eksternal.
- f) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Perangkat Daerah
- g) Sinergitas antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaan belum optimal
- h) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

## F. Sistematika penyajian LKJIP:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan



Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran - lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2021 – 2026.

Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan  **misi ke-2 RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yaitu: Menciptakan Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan inovasi berbasis kemajuan teknologi informasi**, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 - 2026, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mendukung Program ini, ada 4 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
- c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

#### 2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk mendukung Program ini, ada 4 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- c. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- d. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk mendukung Program ini, ada 11 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penataan Organisasi
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- i. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- j. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- k. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk rencana induk (*Master Plan*) secara komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*Competitive Disadvantage*).

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudkan suatu pelayanan yang prima. Selanjutnya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



## 1. Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur staf Pemerintah Kabupaten harus mampu mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mendorong dan merangsang kinerja untuk mewujudkan gambaran masa depan yang diinginkan.

Oreintasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 :

**” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (SETARA) dan Berbudaya Gotong royong ”**

Tabel 2.1  
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
<b>Sejahtera</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan;</li><li>b. Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai</li><li>c. Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya</li><li>d. Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai</li><li>e. Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri.</li></ul>
<b>Adil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan</li><li>b. Menghilangkan ego structural</li><li>c. Menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongan</li><li>d. Pelaksanaan segala regulasi dan Perundang-undangan yang berkeadilan</li></ul>

UNSUR VISI	PENJELASAN
<b>Merata</b>	a. Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian b. Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai c. Terbukanya konektivitas antar wilayah
<b>Bergotong royong</b>	a. Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan b. Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas c. Menumbuhkan sikap tolong menolong d. Mempererat tali silaturahmi dan atau persaudaraan e. Meningkatkan rasa solidaritas f. Memperkokoh Persatuan

Sumber : Renstra Setda 2016-2021

## 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diatas, haruslah ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu Instansi Pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu Instansi Pemerintah yang ingin dicapai.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kabupaten Pekalongan tahun 2021 - 2026 adalah:

- 1) Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong;
- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
- 3) Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal;
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keadilan dan pemerataan
- 5) Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan mengarah pada pencapaian unsur visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) yaitu berada pada **misi ke-2 yaitu: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.**

### 3. Tujuan

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka perlu disusun tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan periode Renstra 2021 – 2026 yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

### 4. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 2021 - 2026 yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik yang Didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai yang dilaksanakan dalam dalam jangka waktu lima tahun kedepan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Misi 2 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi</b>									
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	64,60	B (66)	B (70)	B (71)	BB (73)	BB (74)
		1) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten	64,02	B (65)	B (67)	B (70)	BB (73)	BB (75)
			b. Tingkat Kematangan Organisasi	S ( 28 – 36)	S ( 32)	S ( 34)	S (35)	T (36)	T (37)
		2) Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	76	78	78	79	80	80

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan 2021 - 2026

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah merupakan proses penyusunan rencana kinerja tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran – sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2023. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tujuan strategis Sekretariat Daerah yang akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. Secara singkat Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023  
Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan

NO.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten	B (67)
		b. Tingkat Kematangan	S (34)

NO.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023
		Organisasi	
2.	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung pemanfaatan teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	84

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tersebut, maka didukung 3 (Program) sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.176.500.000,00
2. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.265.000.000,00
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.080.832.000,00

Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Program di atas mendukung sasaran Sekretariat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
1	2	3		4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten		B (67)
			Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja	100%
			Prosentase Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100%
			Prosentase Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	100%

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
			yang tersusun	
			Prosentase Laporan Penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun secara ketentuan	100%
		b. Tingkat Kematangan Organisasi		S (34)
			Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (angka)
			Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja	100 %
2.	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung pemanfaatan teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten		84
			Prosentase Permohonan Kerjasama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %
			Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %
			Prosentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %
			Prosentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %
			Prosentase Ketersediaan Layanan administrasi Kepegawaian, administrasi Umum	100 %

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
			dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
			Prosentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

Untuk mencapai kinerja 3 (Tiga) Program tersebut, didukung oleh 19 Kegiatan, yang dijabarkan pada tabel dibawah ini:

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
I.	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>676.000.000,00</b>
1.	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100 %	676.000.000,00
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>130.000.000,00</b>
2.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	130.000.000,00
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan</b>	<b>100 %</b>	<b>528.000.000,00</b>



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		<b>ketentuan</b>		
3.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	528.000.000,00
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %	2.645.254.200,00
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %	11.197.245.800,00
4.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100 %	13.842.500.000,00
<b>II.</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %	502.000.000,00
5.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian	100 %	242.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		daerah yang dilakukan monev		
6.	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100 %	260.000.000,00
<b>II</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100 %	222.000.000,00
7.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100 %	222.000.000,00
<b>II</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (Angka)	541.000.000,00
8.	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	541.000.000,00
<b>III</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 %	524.800.000,00
9.	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	480.800.000,00
10.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	44.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		yang disusun tepat waktu		
III	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	30.493.880.400,00
11.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	17.469.032.000,00
12.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	202.000.000,00
13.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.660.718.800,00
14.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.437.129.600,00
15.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	1.981.001.890,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
16.	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase bulan pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	2.220.000.000,00
17.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100 %	2.523.998.110,00
<b>III</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	4.062.151.600,00
18.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.054.153.700,00
19.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.007.997.900,00
				<b>51.522.332.000,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun kedua perencanaan pada Renstra Tahun 2021 – 2026, sehingga capaian kinerja tahun 2023 ini dibandingkan dengan capaian kinerja satu tahun sebelumnya.

#### **B. PENGUKURAN KINERJA**

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Skala Penilaian dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala seperti di bawah ini :

- a. Lebih dari 100%      Sangat Baik
- b. 75 – 100%            Baik
- c. 55 – 74 %            Cukup
- d. Kurang dari 55 %    Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana strategis 2021 - 2026, untuk tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2023 dan perjanjian kinerja Tahun 2023 untuk mencapai target tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2 (dua) sasaran adalah 101,18 % secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1		2	3		4	5	6
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	B (66,56)	B (70)	B (66,56)*	95,09 %
2.		Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,33)	B (67)	B (64,89)	96,85%
			Tingkat Kematangan Organisasi	S (29,48)	S (34)	S (36,50)	107,35 %
3.		Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83	84	83,44	99,33 %
	Rata – Rata Capaian IKU						99,65 %
	Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran						101,18%

\* Data Tahun 2022, untuk Indeks RB Tahun 2023 belum keluar dari Menpan RB

#### **D. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA**

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 masih menunggu pemberitahuan penerimaan hasil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) sehingga Capaian Kinerja Indikator Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2023 masih menggunakan Skor indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 yaitu sebesar 66,56 dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dari



tahun 2021 yaitu sebesar 1,65 sehingga capaian kinerja indikator Tujuan tahun 2023 adalah sebesar 95,09 % (BAIK).

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah **Nilai SAKIP Kabupaten** dan **Tingkat Kematangan Organisasi**.

Nilai SAKIP Kabupaten ini adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dan Nilai Tingkat Kematangan Organisasi ini diperoleh dari Penilaian Mandiri Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan yang kemudian diverifikasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Nilai Tingkat Kematangan Organisasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 yaitu kategori Sedang ( S 36,50) dengan tingkat capaian kinerja = 107,35%

Untuk Nilai SAKIP Tahun 2023 adalah B (64,89) dari target tahun 2023 yaitu B (67). Secara kategori nilai SAKIP ini sesuai target yaitu B atau Baik namun secara angka belum mencapai target yang di inginkan. sehingga secara Capaiannya = 96,85 %.

Rata – Rata Kinerja sasaran ini mencapai = 102,1 %

Tabel 3.2  
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2021	CAP. TH. 2022	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	REALIASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP Kabupaten	64,18	64,33	B (67)	B (64,89)	96,85	BB (75)	Tercapai dengan kategori Baik
2	Tingkat Kematangan Organisasi	S (29,07)	29,48	S (34)	S (36,50)	107,35	T (37)	Tercapai dengan kategori SANGAT

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2021	CAP. TH. 2022	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	REALIASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata – rata							102,1	Baik

Untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja **Nilai SAKIP Kabupaten**, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 %	100%	100 %
1.1	Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100%	100 %
	a. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	100%
	b. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1.2.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	3 Laporan	3 Laporan	100%
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja mencapai 100 %, dengan kegiatan Penataan Organisasi dan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah dan capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan untuk subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Dalam rangka Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Bagian Organisasi melakukan Fasilitasi atau pendampingan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) sehingga pada Tahun 2023 ini, Kabupaten Pekalongan berhasil masuk dalam kategori Zona hijau dari hasil Penilaian oleh pihak Ombudsman RI, melakukan fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja LHE MENPAN dan Penyusunan Raperbup Tata Naskah Dinas dan Raperbup Sistem Kerja.

Bagian Organisasi dalam rangka monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana telah menyusun laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pemkab serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan, Bagian Organisasi telah menyusun dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah dan SKM Kabupaten Pekalongan yang bersumber dari survey kepuasan masyarakat pada semua unit pelayanan publik yaitu sejumlah 45 Perangkat Daerah, dokumen SKM ini menghasilkan 1 Dokumen berupa laporan IKM Pemkab dan dikirimkan ke Kementerian PAN RB melalui website [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id).

Dalam mendukung capaian kinerja Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja, telah tersusun dengan baik dan tepat waktu dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah dan LKjIP Kabupaten, Dokumen Perjanjian Kinerja Pemkab dan Sekretariat Daerah, Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2024 ( Pemkab dan Setda), Dokumen Rencana Aksi, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 (Pemkab dan Setda), dan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Rencana Kerja SetdaPerubahan 2023, Dokumen Penilaian Risiko Setda Tahun 2023 serta laporan Evaluasi Renja Setda Tahun 2023

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini adalah masih terdapat keterlambatan perangkat daerah dalam mengirimkan data dan dokumen yang diminta.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan penagihan ke Perangkat Daerah serta jemput bola data yang diminta.

## 2. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	a. Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100%	100%	100%
2.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev	100 %	100%	100%
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100%	100%	100%
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
	Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UMKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
	b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun, mencapai 100%.

Capaian Program ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Perekonomian.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terdiri dari sub kegiatan:

a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa koordinasi dan pembinaan terhadap kinerja keuangan pada BUMD dan BLUD, sinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah dengan BUMD dan BLUD.

Bagian Perekonomian melakukan pembinaan kepada 4 BUMD yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta kajen dan 29 BLUD yang terdiri dari 27 Puskesmas se-Kabupaten Pekalongan, RSUD Kajen dan RSUD Kraton.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah, fasilitasi percepatan akses keuangan daerah serta melakukan pengendalian dan distribusi perekonomian di Kabupaten Pekalongan. Langkah-langkah konkrit yang dilaksanakan dalam pengendalian inflasi daerah diantaranya melakukan pemantauan harga dan memastikan ketersediaan stok bahan pokok, memperkuat kerjasama antar daerah guna mengurangi disparitas harga dan melanjutkan program operasi pasar dan bazar pangan murah.

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen rencana kegiatan dan program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), melakukan fasilitasi kesekretariatan DBHCHT Kabupaten Pekalongan, dan melakukan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah menghimpun data penghematan energi se-Kabupaten Pekalongan, melakukan pemantauan terhadap pengadaan dan peredaran pupuk, pestisida dan LPG 3 Kg dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan.

Hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan pencapaian indikator adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan jumlah personil di Bagian Perekonomian yang masih terbatas.

Alternatif solusi dalam mengatasi hambatan dengan memaksimalkan sumber daya serta mengajukan penambahan personil dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	b. Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100%	100%	100%
2.3.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100%	100%	100%
	a. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	b. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pelaporan (SIMPEL)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase laporan



pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang capaian kerjanya juga mencapai 100%. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, terdiri dari subkegiatan:

- a. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, yaitu menyusun laporan hasil koordinasi dan pengendalian progres kegiatan belanja APBD TA. 2023 dengan mengadakan rapat evaluasi rutin setiap bulannya, dan monitoring lapangan terhadap kegiatan/proyek fisik di Kabupaten Pekalongan
- b. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yaitu menyusun laporan Buku Kegiatan APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (Bankeu), Tugas Pembantuan (TP) TA. 2023, dan menyusun laporan Buku Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Berkurangnya jumlah personil pada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Pekalongan karena promosi jabatan;
- 2) Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Belum semua OPD secara rutin menginput laporannya di Aplikasi SIMPEL;

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengajukan penambahan personil di Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Pekalongan yang berkompeten;
- 2) Dukungan alokasi anggaran yang cukup;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam hal penginputan di Aplikasi SIMPEL;

### 3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
3.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100 %	100 %	100%
	a. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada	1 kali	1 kali	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri dari subkegiatan:

- a. Penataan Administrasi Pemerintahan, yaitu Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang adminstrasi pemerintahan, pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat,fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah.Dokumen yang dihasilkan yaitu dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi pembekalan kepemimpinan dalam satu tahun
- b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, pada subkegiatan ini dihasilkan dokumen Penegasan batas daerah, untuk tahun 2023 ini penegasan batas daerah yang dilaksanakan adalah penegasan batas daerah dengan Kota Pekalongan.Selain ini juga dihasilkan dokumen pembakuan rupa bumi.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah,pada subkegiatan ini dihasilkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan ATA. 2022,Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Dokumen Standar Pelayanan Minimal dan Dokumen Pergantian antar Waktu (PAW) serta Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada tahun 2024 yang berupa sosialisasi dan rapat – rapat persiapan

Untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja **Tingkat Kematangan Organisasi**, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (angka)	8 (angka)	88,89 %
1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang	Persentase terselesaikannya	100 %	100 %	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
	dan Jasa	tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
	a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	130 Dokumen	131 Dokumen	101 %
	b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	170 Orang	170 Orang	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program perekonomian dan pembangunan dengan indikator Tingkat kematangan UKPBJ mencapai 88,89 %.

Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ didefinisikan sebagai instrument pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa) yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKBPJ dalam upaya pengembangan/Penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 Variabel meliputi :

- a. Domain Proses, yang mencakup variabel manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, dan manajemen resiko

- b. Domain kelembagaan, yang mencakup variabel pengorganisasian, dan tugas/fungsi
- c. Domain Sumber Daya manusia, yang mencakup variabel perencanaan dan Pengembangan
- d. Domain Sistem Informasi, dengan variabel Sistem Informasi

Dari 9 Variabel penilaian diatas, saat ini UKPBJ Kabupaten Pekalongan dalam hal ini adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Pekalongan sudah memenuhi 8 Variabel, 1 Variabel yang belum terpenuhi adalah variabel manajemen pengadaan. Saat ini UKPBJ sudah memenuhi persyaratan untuk mencapai level 9, namun untuk penilaiannya masih menunggu hasil penilaian oleh LKPP.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang capaian kinerjanya mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 131 paket dengan rincian 129 Pemenang dan 2 tender gagal/tanpa pemenang.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

- 1) Terlambatnya pengisian SIRUP oleh Pengguna Anggaran
- 2) Terjadinya permasalahan di Sistem Pengadaan secara Elektronik
- 3) Terlambatnya dokumen tender yang dimasukkan ke UKPBJ dari PPK
- 4) Kurangnya SDM Kelompok Kerja Pemilihan di UKBJ Kabupaten Pekalongan

Alternatif Solusi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- 1) Memberikan Sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengisian SIRUP sehingga bisa tepat waktu, memberikan petugas pendampingan dalam persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik agar memanfaatkan fasilitas LPSE Support yang ada, sehingga permasalahan cepat terselesaikan.

- 3) Menghimbau kepada OPD Se – Kabupaten Pekalongan untuk segera memasukkan berkas tender sehingga tender dapat terlaksana di awal tahun anggaran.
- 4) Meningkatkan Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ Kabupaten Pekalongan dengan Bintek ataupun Uji Kompetensi yang diselenggarakan LKPP yang dibiayai oleh pemerintah

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	100%	100%
2.1	Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100 %	100%
	a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	b. Peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi	Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung Indikator Sasaran Tingkat Kematangan Organisasi , yaitu Kegiatan Penataan Organisasi dengan subkegiatan :

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada subkegiatan ini berupa penyusunan Peraturan Bupati tentang SOTK dan Peraturan Bupati tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja

b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Output yang dihasilkan pada subkegiatan ini adalah Raperbup Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023 - 2026

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1) Regulasi dari MENPAN RB yang berubah – ubah

Alternatif Solusi untuk mengatasi kendala/hambatan :

1) Melakukan koordinasi dengan provinsi maupun kementerian

2) Melakukan penyesuaian produk hukum sesuai regulasi/ketentuan

**Sasaran 2 : Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2021	CAP. TH. 2022	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	82,57	83	84	83,44	99,33%	80	Tercapai dengan baik

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten. Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 99,33%.

Untuk Target indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten tahun 2023 ini lebih tinggi dari target awal yang ditentukan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan maupun RENSTRA SETDA yang di tahun 2023 hanya menargetkan indeks IKM sebesar 80. Sehingga jika dibandingkan dengan target RPJMD maupun RENSTRA capaian IKM Kabupaten Tahun 2023 melebihi target.

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Kabupaten ini diperoleh dari rata – rata nilai IKM yang ada pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

Untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja sasaran ini, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Prosentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
1.1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	100%	100%
	a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	23 Dokumen	153,33%
	b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase permohonan kerjasama sesuai ketentuan yang difasilitasi mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi Kerjasama yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan,dengan subkegiatan sebagai berikut :



a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama Dalam Negeri yang dihasilkan pada tahun 2023, adalah:

- Kerjasama dalam bentuk Sinergi ( dukungan Program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ) : 7 (tujuh) Naskah Kesepakatan
- Kerjasama dengan Daerah lain : 3 (Tiga) Naskah Kesepakatan Bersama dan 4 (empat) naskah perjanjian kerjasama
- Kerjasama dengan Pihak ketiga (lembaga/Universitas) : 5 (Lima) Naskah Kesepakatan bersama dan 4 (Empat) Naskah Perjanjian Kerjasama.

b. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri

- Kerjasama dengan Pemerintah Di Luar Negeri : 1 laporan

c. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Berupa laporan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
		b. Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	100 %
1.2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
	b. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	17 Kasus	17 Kasus	100 %
		Pemenuhan data laporan aksi HAM dan penilaian Peduli HAM	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	c. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIH dan arsip Produk hukum Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan mencapai 100 %, dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum capaian kerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Hukum dengan subkegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati Pekalongan dan

Keputusan Bupati Pekalongan yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan.

b. Fasilitasi Bantuan Hukum

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah:

- memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- Mengkoordinasikan data dari OPD terkait penyusunan Laporan Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM

c. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah: melaksanakan pengelolaan website JDIH dan pengarsipan Produk Hukum Daerah serta mendokumentasikannya.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Kurangnya jumlah personil pada Hukum SETDA Kabupaten Pekalongan ;
- 2) Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 4) Sumber daya manusia yang masih kurang penguasaan dalam bidang teknologi.
- 5) Kurangnya tenaga fungsional jenjang Ahli Muda yang bertindak sebagai PPTK Sub Kegiatan karena adanya mutasi 2 tenaga fungsional Ahli Muda sehingga hanya ada satu PPTK yang handle 5 sub kegiatan

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengajukan penambahan personil di Hukum SETDA Kabupaten Pekalongan yang berkompeten;
- 2) Dukungan alokasi anggaran yang cukup;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; dan
- 4) Penambahan tenaga fungsional Ahli Muda melalui INPASSING dari Jabatan Fungsional Umum.
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam bidang teknologi

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1.		c. Presentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100%	100%	100%
1.3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
	a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.		d.Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%
1.4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan	100 %	100 %	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
		sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi			
	b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, dan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
	Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Bina Mental spiritual mencapai 100 % dan Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi juga mencapai 100 %.

Capaian Program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang capaian kinerjanya mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat,dengan subkegiatan:

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual antara lain :

1) Fasilitasi Penyelenggaraan haji (Pengantaran dan penjemputan calon jamaah haji ke Asrama Donohudan – Solo)

Pelepasan Pemberangkatan Jamaah Haji terbagi menjadi 3 kloter yaitu kloter 39 yang berjumlah 315 orang yang dilepas pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 06.30 Pagi sedangkan kloter 40 & 41

berjumlah 332 calon jamaah haji pada sore hari nya pada hari Minggu, 4 Juni 2023 jam 22.00 WIB



Pemulangan Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan Kloter 39, 40 & 41 pada tanggal 17 – 18 Juli 2023. Rombongan Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan Kloter 39 tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali Tanggal 17 Juli Pukul 23.45 WIB. Pada Tanggal 18 Juli jam 06.30 WIB rombongan jama'ah Haji kloter 39 tiba dan diterima Bupati di Pendopo. Sedangkan rombongan Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan Kloter 40 & 41 tiba di Asrama Haji Donohudan Boyolali Pukul 10.30 WIB. Pada jam 18.30 WIB rombongan jama'ah Haji kloter 40 tiba dan diterima Bupati di Pendopo.



2) Fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) diantaranya :

a) Isro Mi'roj

Pelaksanaan Isra Miroj Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada tanggal 20 Febuari 2023 dengan penceramah Habib Ahmad Al-Habsyi dari Jakarta, yang dihadiri ribuan jamaah dari seluruh daerah



b) Nuzulul Qur'an

Peringatan Nuzulul Quran dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023 dengan penceramah KHR Syarif Rahmat, MA pendiri Ponpes Ummul Qura dari Tangsel. Acaranya berjalan lancar dan dihadiri oleh ribuan Jamaah



c) Perayaan Idul Adha

Peringatan Hari Raya Idul Adha 1444 H di tingkat Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan di Masjid Al Muhtaram – Kajen pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 dengan pemotongan hewan Qurban





d) Maulud Nabi Muhammad SAW

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanaka pada tanggal 26 September 2023 di Masjid Al Muhtaram – Kajen



3) Fasilitasi Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Pekalongan di wilayah Kabupaten Pekalongan

Kegiatan yang dianggarkan untuk Pembinaan Bupati Pekalongan Bidang Keagamaan yang berupa menghadiri Kegiatan Keagamaan di wilayah Kabupaten Pekalongan, undangan dari masyarakat maupun kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pekalongan. Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2023 dengan total kegiatan sebanyak 120 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Pekalongan, seperti : Tarawih Keliling, Doa Bersama 1 Muharram 1445 H tingkat Kabupaten, Doa Bersama Antar Umat Beragama dalam rangka Hari Jadi ke 401 Kabupaten Pekalongan, Doa Bersama Ummat Kristiani Se Pekalongan Raya, Kabupaten Pekalongan Bersholawat dalam rangka Peringatan HUT ke 78 RI dan Hari Jadi ke 401 Kabupaten Pekalongan

4) Fasilitasi Peringatan Hari Santri (Ziarah Makam Ulama)

Dilaksanakan pada hari Senin – Selasa (30 s/d 31 Oktober 2023) di Makam Gusdur-Jombang dan Makam Sunan Kalijaga-Demak. Peserta

Ziarah 400 orang warga Kabupaten pekalongan. Peserta Ziarah terdiri dari guru-guru TPQ MADIN se- Kabupaten Pekalongan sejumlah ± 300 orang

b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial antara lain :

1) Pemberian Bantuan Sosial Kambing Qurban kepada lembaga Non Pemerintahan dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1444 H

Pada tahun 2023 tersedia anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) diserahkan dalam bentuk Kambing Qurban sebanyak 43 ekor yang diserahkan kepada lembaga yang tersebar di wilayah Kabupaten Pekalongan.



2) Pemberian Insentif Imam dan Marbot Masjid di wilayah Kabupaten Pekalongan

Pemberian Insentif Kepada 870 Iman Masjid dan 870 Marbot Masjid yang sesuai usulan data dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan anggaran Rp.1.740.000.000,- (satu milyar tujuh ratus Empat puluh juta rupiah) diserahkan kepada 870 Marbot Masjid dan 870 Imam Masjid pada saat bulan Ramadhon atau bulan April 2023 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

3) Pemberian insentif penjaga keamanan makam di wilayah Kabupaten Pekalongan

Insentif penjaga keamanan makam diberikan kepada Penjaga Makam di 285 Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan anggaran Rp.85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

teralisasi Rp.84.900.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) atau 99% dengan masing-masing penjaga makam menerima insentif sebesar Rp.300.000,- selisih 2 desa yaitu Kelurahan Wiradesa dan Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa dikarenakan tidak mengusulkan karena di wilayah tersebut tidak terdapat Makam di lokasi kelurahan/desa tersebut.

- 4) Pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar
  - a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan , Terdiri 2 lembaga Baznas & AIDS dengan realisasi 100%
  - b. Belanja hibah yang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), berjumlah 211 lembaga dengan realisasi sebesar Rp.4.887.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk 109 lembaga (51%) dengan sisa 102 lembaga, dikarenakan tidak memenuhi syarat administrasi
  - c. Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang bersifat sosial kemasyarakatan Terdiri dari 3 lembaga yaitu: (KPAIDS, LPM Mandiri dan Pura Satya Bhakti Yoga) dengan realisasi sebesar Rp.210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) atau 100%
  - d. Pemberian bantuan yang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) berjumlah 21 lembaga dengan realisasi sebesar Rp.345.800.000,- (Tiga Ratus Empat puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk 20 lembaga (99%) dengan sisa 1 lembaga (Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Nurul Yatama Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto) tidak cair, dikarenakan tidak memenuhi syarat administrasi (Tidak Ada rekening Lembaga)
    - 1) Lembaga Sosial Al Hikmah Nahdatul Ulama
    - 2) Lembaga Sosial Ummul Yatama

- 3) Organisasi Sosial Anak Yatim Yarohim
- 4) Panti Asuhan Anak Yatim La Tahzan Muhammadiyah Cabang  
Pencongan Wiradesa
- 5) Panti Asuhan Arrahman Kelurahan Bener Kecamatan  
Wiradesa
- 6) Panti Asuhan Darul Aitam Al Maktab Desa Simbang Kulon  
Kecamatan Buaran
- 7) Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU Sedayu  
Kecamatan Wonopringgo
- 8) Panti Asuhan MPKKM PCM Muhammadiyah Wonopringgo
- 9) Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Kelurahan Pekajangan  
Kecamatan Kedungwuni
- 10) Panti Asuhan Raudhotus Sibyan Desa Proto Kecamatan  
Kedungwuni
- 11) Panti Asuhan Yatim dan Miskin MPS Cabang Muhammadiyah  
Kedungwuni
- 12) Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri Muhammadiyah Kajen
- 13) Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Kelurahan Pekajangan  
Kecamatan Kedungwuni
- 14) Yayasan Darul Khadhonah Desa Petukangan Kecamatan  
Wiradesa
- 15) Yayasan Malakhatul Ummah Kelurahan Mayangan  
Kecamatan Wiradesa
- 16) Yayasan Non Panti Yatama Al Amin Desa Kedungjaran  
Kecamatan Sragi
- 17) Yayasan Sayap Sehat Karanganyar
- 18) Yayasan Sosial Tabarat Kelurahan Kepatihan Kecamatan  
Wiradesa

19) Yayasan Yatim Non Panti Mu'awanatul Aitam Simbang Kulon  
Kecamatan Buaran

20) Yayasan Yatim Piatu Non Panti Bani Aziz Fatimah Desa  
Rowokembu Kecamatan Wonopringgo

c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait  
Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan,  
Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat antara  
lain:

1) Memfasilitasi Kegiatan MTQ, STQ, MHQ Kabupaten Pekalongan

Dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 September 2023 di Kompleks  
Islamic Centre Kedungwuni. Peserta terdiri dari MTQ Pelajar di ikuti  
oleh perwakilan pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Putra/Putri dari  
Kafilah 19 Kecamatan (225 peserta) & MTQ Umum di ikuti oleh Anak,  
Remaja dan Dewasa Putra/Putri perwakilan Kafilah dari 19 Kecamatan  
(102 peserta).

Kejuaraan memperebutkan Terbaik I, II, III tiap-tiap cabang dan  
diberikan Trophy, Piagam serta Uang Pembinaan, yang akan  
diserahkan pada akhir pelaksanaan MTQ Pelajar dan MTQ Umum.  
Selain Terbaik I, II dan III masing-masing cabang yang dilombakan,  
kejuaraan ini juga memperebutkan Piala Bergilir Bupati Pekalongan.  
Dengan juara I (Kecamatan Kedungwuni) Juara II (Kecamatan Buaran)  
dan Juara III (Kecamatan Siwalan).

Di tahun 2023 tidak dilaksanakan LPTQ tingkat Nasional dan provinsi,  
dan akan dilaksanakan kembali di tahun 2024.

2) Fasilitasi Doa Bersama Yatim Piatu dan Pengajian Akbar

Tidak ada kegiatan dikarenakan pada perubahan anggaran digabung  
untuk kegiatan Pengajian Akbar dalam Rangka Semarak Hari Santri

3) Fasilitasi Semarak Hari Santri Tingkat Kabupaten

Ada 2 kegiatan dalam semarak hari santri yaitu Apel Besar hari santri  
dan pengajian akbar (Kabupaten Bersholawat) dalam rangka Hari  
Santri Nasional

- Kabupaten Bersholawat dalam rangka Hari Santri Nasional  
Dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023 dengan pembicara Gus Ali Shodikin (dari Semarang) Serta Dimeriahkan oleh Jami'yah "MAFIA SHOLAWAT" dan Rebana Semut Ireng Semarang
- Upacara Hari Santri Nasional  
Upacara Hari Santri Nasional dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2023 peserta Upacara terdiri dari unsur Forkompimda, PCNU, PD Rifaiyah, PD Muhammadiyah, PD LDII, ITS NU, Kepala OPD, Camat, ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa, TNI, POLRI, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan Santri Pondok Pesantren, Mahasiswa, Siswa/Siswi Sekolah sejumlah ± 25.000 orang.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Berkurangnya jumlah personil pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Pekalongan karena promosi jabatan
- 2) PPTK pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda hanya ada 1 (satu) Subkoordinator, maka penunjukan PPTK untuk kegiatan mengalami kendala
- 3) Kurangnya koordinasi dengan OPD lain terkait perencanaan kegiatan;
- 4) Belum ada teknologi aplikasi dalam penanganan usulan hibah/bansos;
- 5) Regulasi terkait tata laksana administrasi hibah/bansos belum terupdate dengan aturan yang ada
- 6) Adanya anggaran untuk hibah pikir, tetapi tidak didukung dengan administrasi dari pengusul.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengajukan penambahan personil di Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Pekalongan yang berkompeten;
- 2) Mengajukan penambahan Subkoordinasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Pekalongan;
- 3) Mengkoordinasikan dengan OPD teknis terkait kegiatan yang dapat disatukan sehingga ada efisiensi anggaran;
- 4) Membuat usulan terkait Pengadaan Aplikasi E-Hibah/Bansos

- 5) Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai Regulasi Hibah/Bansos agar segera diperbaharui
- 6) Dukungan dari pihak pengusul agar mengirimkan proposal permohonan satu tahun sebelumnya.

## 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a.Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	100 %
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bul an	144 Orang/Bul an	100%
	b Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan	100 %	100 %	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
		pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			
	a Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	21 Orang	140%
	c Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	106 Orang	117,78%
	d Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100%
2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%



No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
	a Penyediaan . Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	b Penyediaan . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	c Penyediaan . Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	d Penyediaan . Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	e Fasilitasi . Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	g Penatausahaan . Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	2500 Dokumen	100 %
2.4	Penyediaan Jasa	Persentase	100 %	100 %	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
	a Penyediaan Jasa . Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	b Penyediaan Jasa . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	c Penyediaan Jasa . Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	d Penyediaan Jasa . Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100 %
2.5	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase bulan pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %
	a Penyediaan . Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Paket	12 Paket	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
		yang Disediakan			
	b. Penyediaan . Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100 %
2.6.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100 %
	b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang/ Bulan	8 Orang/ Bulan	100 %
2.7	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100 %	100%	100 %
	a. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	4 Laporan	4 Laporan	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
		Keprotokolan			
	b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
	c. Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah mencapai 100 %.

Kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian indikator prosentase ketersediaan layanan adminatrasi kepegawaian,adminstrasi umum dan jasa penunjang ursan pemerintah merupakan kegiatan rutin yang diampu oleh Bagian Umum, Bagian Hukum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian capaian kinerja :

- 1) Terbatasnya SDM yang menguasai kehumasan
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Perlu adanya Pelatihan kehumasan dan studi tiru ke daerah lain
- 2) Memaksimalkan Sarara prasarana yang ada dan mengajukan permohonan pengadaan sarpras

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
2		a. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
2.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	84 Unit	100 %
2.9	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	58 Unit	88 Unit	152 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
	Operasional atau Lapangan	pemerintahan daerah			
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	100 %
	c. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	134 Unit	447 %
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit	100 %
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100 %

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah mencapai 100 %.

Kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian indikator prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan rutin yang diampu oleh Bagian Umum.

**E. MATRIKS REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS YANG TERKAIT RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target RPJMD	% Capaian terhdp Target Akhir RPJMD
					Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B (64,33)	B (67)	B (64,89)	96,85 %	BB (75)	86,52
2	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Rata – rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Nilai	83	84	83,44	99,33	80	104,30

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis :

Sekretariat Daerah mendukung sasaran strategis Misi Ke – 2 ( dua) pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026

1. Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah,

dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 96,85 % atau tercapai dengan kategori **Baik**.

2. Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dengan indikator Rata – rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten dengan capaian kinerja 99,33 % atau tercapai dengan Kategori **Baik**

Untuk Target indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten tahun 2023 ini lebih tinggi dari target awal yang ditentukan pada Dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan maupun RENSTRA SETDA yang di tahun 2023 hanya menargetkan indeks IKM sebesar 80. Sehingga jika dibandingkan dengan target RPJMD maupun RENSTRA capaian IKM Kabupaten Tahun 2023 melebihi target

3. Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun sebelumnya ada pada data di bawah ini:

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Nilai SAKIP	64,02	64,18	64,33	64,89
IKM	82,13	82,57	83	83,44

Pada tabel diatas, dapat dilihat bawah capaian kinerja untuk Nilai SAKIP dan IKM mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya.

4. Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis adalah :

- a) Dalam Evaluasi SAKIP bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen – dokumen Perencanaan (RKT dan Renstra/RPJMD, Renja/RKPD), Penganggaran, laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi tapi adanya dokumen – dokumen lain
- b) Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di Lingkungan Perangkat Daerah
- c) Implementasi SAKIP belum optimal, salah satu aspeknya adalah terkait dengan komitmen dan koordinasi



d) Keterlambatan unit pelayanan publik dalam menyusun Survey Kepuasan Masyarakat

5. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah dengan Capaian Realisasi kinerja Nasional/Provinsi :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Capaian Nasional/Provinsi Tahun 2023	% Capaian
1	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B (64,89)	B (63,36) Rata- rata Capaian AKIP dari 499 Kab/Kota	102,41 %
		Tingkat Kematangan Organisasi	S (36,50)	Tinggi <b>(41,02)</b> Capaian Provinsi Jawa Tengah	88,98 %
2	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	83,44	87 Capaian Provinsi Jawa Tengah	95,91 %

#### F. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan memperoleh dana bersumber dari APBD II yang berupa anggaran belanja pengadaan dan anggaran belanja non pengadaan.

Belanja Non Pengadaan atau yang dulu disebut Belanja Tidak Langsung (Anggaran gaji/tunjangan ASN Dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta

Belanja Hibah Uang dan Bantuan Sosial uang ) sebesar Rp. 27.049.897.800,00 terealisasi sebesar Rp. 22.697.450.444,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.352.447.356,00 Belanja pengadaan atau belanja langsung diluar belanja pegawai/Hibah dan Bansos uang sebesar Rp. 24.472.434.200 terealisasi sejumlah Rp. 24.117.114.637,00 sisa anggaran Rp. 355.319.563,00 Dengan keseluruhan belanja pengadaan maupun belanja non pengadaan sebesar Rp. 51.522.332.000,00 realisasi Rp. 46.814.565.081,00 sisa anggaran Rp. 4.707.766.919,00

Terdapatnya sisa anggaran karena ada efisiensi dan pengeluaran belanja sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan jumlah dana belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terinci sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dari anggaran Rp. 806.000.000,- terserap sejumlah Rp729.469.237,-dan sisa anggaran Rp. 76.530.763,-
- b. Dilaksanakan oleh Bagian Hukum dari anggaran Rp. 598.000.000,- terserap sejumlah Rp. 537.492.953,-dan sisa anggaran Rp 60.507.047,-
- c. Dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dari anggaran Rp. 13.842.500.000,- terserap sejumlah Rp. 10.786.558.210,- dan sisa anggaran Rp. 3.055.941.790,-
- d. Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dari anggaran Rp. 502.000.000,- terserap sejumlah Rp 356.099.650,- dan sisa anggaran Rp. 145.900.350,-
- e. Dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dari anggaran Rp. 266.000.000,- terserap sejumlah Rp. 250.030.396,- dan sisa anggaran Rp. 15.969.604,-
- f. Dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dari anggaran Rp. 541.000.000,- terserap sejumlah Rp. 538.721.985,- dan sisa anggaran 2.278.015,-
- g. Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dari anggaran Rp. 480.800.000,- dan terserap sejumlah Rp. 425.736.307,- dan sisa anggaran Rp. 55.063.693,-
- h. Dilaksanakan oleh Bagian Umum dari anggaran Rp. 30.876.032.000,- dan terserap sejumlah Rp. 29.598.377.962,-dan sisa anggaran Rp. 1.277.654.038,-

- i. Dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dari anggaran Rp. 3.610.000.000,- dan terserap sejumlah Rp. 3.592.078.381,- dan sisa anggaran Rp. 17.921.619,-

Dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan administrasi keuangan secara tertib sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

#### G. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>a. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan</b>	100 %	100 %	100 %	676.000.000,00	600.993.649,00	88,90	11,10%
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100 %	100 %	100 %	676.000.000,00	600.993.649,00	88,90	11,10%
		<b>b. Prosentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi</b>	100 %	100 %	100 %	130.000.000,00	128.475.588,00	98,83	1,17 %
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	130.000.000,00	128.475.588,00	98,83	1,17 %
		<b>c. Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan</b>	100 %	100 %	100 %	528.000.000,00	471.758.153,00	89,35	10,65%
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk	100 %	100 %	100 %	528.000.000,00	471.758.153,00	89,35	10,65%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
		kebijakan daerah							
		<b>d. Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi</b>	100 %	100 %	100 %	2.645.254.200,00	2.568.522.810,00	97,10	2,90%
		<b>e. Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi</b>	100 %	100 %	100 %	11.197.245.800,00	8.218.035.400,00	73,39	26,61%
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	13.842.500.000,00	10.786.558.210,00	77,92	22,08
2.	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>a. Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun</b>	100 %	100 %	100 %	502.000.000,00	356.099.650,00	70,94	29,06
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev	100 %	100 %	100 %	242.000.000,00	156.111.135,00	64,51	34,49%
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100 %	100 %	100 %	260.000.000,00	199.988.515,00	76,92	92,08 %
		<b>b. Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan</b>	100 %	100 %	100 %	222.000.000,00	208.524.694,00	93,93	6,07 %

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
		<b>pembangunan yang tersusun</b>							
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100 %	100 %	100 %	222.000.000,00	208.524.694,00	93,93	6,07 %
		<b>c. Tingkat Kematangan UKPBJ</b>	9 Angka	8 Angka	88,89	541.000.000,00	538.721.985,00	99,58	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	100 %	541.000.000,00	538.721.985,00	99,58	0,42%
<b>3.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>a. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</b>	100 %	100 %	100 %	524.800.000,00	467.242.009,00	89,03	10,97
	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100 %	100 %	480.800.000,00	425.736.307,00	88,55	11,45 %
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %	44.000.000,00	41.505.702,00	94,33	5,67 %
		<b>b. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	30.493.880.400,00	29.246.423.521,00	95,91	4,09%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	17.469.032.000,00	16.517.795.218,00	94,55	5,45 %
	Kegiatan Administrasi	Persentase ketercapaian	100 %	100 %	100 %	202.000.000,00	168.706.750,00	83,52	16,48 %

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Kepegawaian Perangkat Daerah	pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	2.660.718.800,00	2.633.362.883,00	98,97	1,03
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	3.437.129.600,00	3.363.510.100,00	97,86	2,14
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	1.981.001.890,00	1.850.186.437,00	93,40	6,60%
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase bulan pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	100 %	2.220.000.000,00	2.204.334.963,00	99,29	0,71 %
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolanan yang terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	2.523.998.110,00	2.508.527.170,00	99,39	0,61%
		<b>c. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	4.062.151.600,00	4.009.767.622,00	98,71	1,29%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	1.054.153.700,00	1.030.515.130,00	97,76	2,24%
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	3.007.997.900,00	2.979.252.492,00	99,04	0,96%

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Daerah	daerah							

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersirat dalam Bab III, maka dapat diketahui sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 2 (dua)** sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, indikator kinerja sasaran sudah mencapai kategori yang diharapkan dan secara nilai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran tertinggi adalah Tingkat Kematangan Organisasi dengan capaian sebesar 107,35 %

Nilai rata-rata Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar 99,65 %, capaian kinerja ini masuk dalam kategori **Baik**

#### **B. Prestasi yang diraih di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.**

Prestasi/ Penghargaan/ Kejuaraan/ Lomba Tahun 2023 yang diraih adalah :

1. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KemenPANRB meraih Nilai B dengan Predikat Baik
2. Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI meraih Nilai Zona Hijau

#### **C. Hal – hal yang ingin dicapai ditahun mendatang**

- 1) Meningkatkan peran sekretariat daerah selaku fungsi koordinator dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas sehingga bisa mencapai target Nilai AKIP yang direncanakan
- 3) Meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kinerja dan reformasi birokrasi sesuai dengan regulasi yang ada



- 4) Melaksanakan pengelolaan Kelembagaan sesuai regulasi terbaru sehingga indeks kematangan organisasi yang ditargetkan bisa tercapai
- 5) Meningkatkan capaian Tingkat Kematangan UKPBJ agar mencapai angka tertinggi yaitu 9 (sembilan).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yang dapat kami sampaikan, sebagai acuan kerja selanjutnya.

Kajen, 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



M.YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

**MATRIK CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN	SERAPAN	SELISIH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	%								
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (67)	B (64,89)	96,85	86,52	BB (75)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>676.000.000</b>	<b>600.993.649</b>	<b>75.006.351</b>	<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>
									Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	140.000.000	137.269.812	2.730.188	
									Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	160.000.000	158.743.900	1.256.100	
									Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	376.000.000	304.979.937	71.020.063	
								Program Perekonomian dan Pembangunan	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>242.000.000</b>	<b>156.111.135</b>	<b>85.888.865</b>	<b>BAGIAN PEREKONOMIAN</b>
									Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	130.000.000	86.116.945	43.883.055	
									Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	112.000.000	69.994.190	42.005.810	
									<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>260.000.000</b>	<b>199.988.515</b>	<b>60.011.485</b>	
									Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	220.000.000	171.011.800	48.988.200	
									Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000	28.976.715	11.023.285	
									<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>222.000.000</b>	<b>208.524.694</b>	<b>13.475.306</b>	
								Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	72.000.000	65.973.944	6.026.056		
								Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	150.000.000	142.550.750	7.449.250		
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>276.800.000</b>	<b>233.708.744</b>	<b>43.091.256</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>
									Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	58.400.000	48.944.500	9.455.500	
Subkegiatan Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	160.000.000	140.177.902	19.822.098										

									Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	58.400.000	44.586.342	13.813.658	
									<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44.000.000</b>	<b>41.505.702</b>	<b>2.494.298</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>
									Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000	27.004.802	995.198	
									Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	7.186.900	813.100	
									Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	7.314.000	686.000	
		Tingkat Kematangan Organisasi	S (34)	S (36,50)	107,35	T (37)	98,65	Program Perencanaan dan Pembangunan	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>541.000.000</b>	<b>538.721.985</b>	<b>2.278.015</b>	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>
									Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	314.650.000	313.191.193	1.458.807	
									Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	180.000.000	179.680.092	319.908	
									Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46.350.000	45.850.700	499.300	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>204.000.000</b>	<b>192.027.563</b>	<b>11.972.437</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>
									Subkegiatan Peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi	78.000.000	76.141.498	1.858.502	
									Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	126.000.000	115.886.065	10.113.935	
2	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	84	83,44	99,33	80	104,3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<b>Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah</b>	<b>130.000.000</b>	<b>128.475.588</b>	<b>1.524.412</b>	<b>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</b>
									Subkegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	100.000.000	99.963.088	36.912	
									Subkegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	20.000.000	18.665.500	1.334.500	
									Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.000.000	9.847.000	153.000	
									<b>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>	<b>528.000.000</b>	<b>471.758.153</b>	<b>56.241.847</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>
									Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	200.000.000	199.315.478	684.522	
									Subkegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	190.000.000	140.019.875	49.980.125	
									Subkegiatan Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	138.000.000	132.422.800	5.577.200	



Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000	453.319.243	6.680.757	
Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.000.000	23.866.250	133.750	
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.437.129.600</b>	<b>3.363.510.100</b>	<b>73.619.500</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.172.000.000	1.162.562.809	9.437.191	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.129.600	344.216.920	2.912.680	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.848.000.000	1.817.011.371	30.988.629	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000	39.719.000	30.281.000	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.981.001.890</b>	<b>1.850.186.437</b>	<b>130.815.453</b>	<b>BAGIAN UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	895.000.000	766.635.226	128.364.774	<b>BAGIAN UMUM</b>
Subkegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.086.001.890	1.083.551.211	2.450.679	<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>
<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>2.220.000.000</b>	<b>2.204.334.963</b>	<b>15.665.037</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>
Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.275.000.000	1.266.194.192	8.805.808	
Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	945.000.000	938.140.771	6.859.229	
<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.523.998.110</b>	<b>2.508.527.170</b>	<b>15.470.940</b>	<b>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN</b>
Subkegiatan Fasilitas Keprotokolan	202.100.000	201.970.000	130.000	
Subkegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.035.405.000	1.021.746.000	13.659.000	
Subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.286.493.110	1.284.811.170	1.681.940	



**RINCIAN REALISASI KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
<b>1)</b>	<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>	<b>806.000.000</b>	<b>729.469.237</b>	<b>90,50</b>	<b>76.530.763</b>	<b>9,50</b>
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	140.000.000	137.269.812	98,05	2.730.188	1,95
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	160.000.000	158.743.900	99,21	1.256.100	0,79
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	376.000.000	304.979.937	81,11	71.020.063	18,89
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100.000.000	99.963.088	99,96	36.912	0,04
5	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	20.000.000	18.665.500	93,33	1.334.500	6,67
6	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	10.000.000	9.847.000	98,47	153.000	1,53
<b>2)</b>	<b>Bagian Hukum</b>	<b>598.000.000</b>	<b>537.492.953</b>	<b>89,88</b>	<b>60.507.047</b>	<b>10,12</b>
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	200.000.000	199.315.478	99,66	684.522	0,34
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	190.000.000	140.019.875	73,69	49.980.125	26,31
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	138.000.000	132.422.800	95,96	5.577.200	4,04
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	46.649.800	93,30	3.350.200	6,70
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	19.085.000	95,43	915.000	4,58
<b>3)</b>	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>13.842.500.000</b>	<b>10.786.558.210</b>	<b>77,92</b>	<b>3.055.941.790</b>	<b>22,08</b>
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.645.254.200	2.568.522.810	97,10	76.731.390	2,90
2	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.728.300.000	7.789.170.000	72,60	2.939.130.000	27,40
3	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	468.945.800	428.865.400	91,45	40.080.400	8,55
<b>4)</b>	<b>Bagian Perekonomian</b>	<b>502.000.000</b>	<b>356.099.650</b>	<b>70,94</b>	<b>145.900.350</b>	<b>29,06</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	130.000.000	86.116.945	66,24	43.883.055	33,76
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	112.000.000	69.994.190	62,49	42.005.810	37,51
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	220.000.000	171.011.800	77,73	48.988.200	22,27
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000	28.976.715	72,44	11.023.285	27,56
<b>5)</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>	<b>266.000.000</b>	<b>250.030.396</b>	<b>94,00</b>	<b>15.969.604,00</b>	<b>6,00</b>
1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	72.000.000	65.973.944	91,63	6.026.056	8,37
2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	150.000.000	142.550.750	95,03	7.449.250	4,97
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000	27.004.802	96,45	995.198	3,55
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	7.186.900	89,84	813.100	10,16
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	7.314.000	91,43	686.000	8,58
<b>6)</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>541.000.000</b>	<b>538.721.985,00</b>	<b>99,58</b>	<b>2.278.015</b>	<b>0,42</b>
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	314.650.000	313.191.193	99,54	1.458.807	0,46
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	180.000.000	179.680.092	99,82	319.908	0,18
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46.350.000	45.850.700	98,92	499.300	1,08
<b>7)</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>480.800.000</b>	<b>425.736.307</b>	<b>88,55</b>	<b>55.063.693</b>	<b>11,45</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	58.400.000	48.944.500	83,81	9.455.500	16,19
2	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	160.000.000	140.177.902	87,61	19.822.098	12,39
3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	58.400.000	44.586.342	76,35	13.813.658	23,65
4	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	78.000.000	76.141.498	97,62	1.858.502	2,38
5	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	126.000.000	115.886.065	91,97	10.113.935	8,03
<b>8)</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>3.610.000.000</b>	<b>3.592.078.381</b>	<b>99,50</b>	<b>17.921.619</b>	<b>0,50</b>
1	Fasilitasi Keprotokolan	202.100.000	201.970.000	99,94	130.000	0,06
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.035.405.000	1.021.746.000	98,68	13.659.000	1,32

3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.286.493.110	1.284.811.170	99,87	1.681.940	0,13
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.086.001.890	1.083.551.211	99,77	2.450.679	0,23
<b>9)</b>	<b>Bagian Umum</b>	<b>30.876.032.000</b>	<b>29.598.377.962</b>	<b>95,86</b>	<b>1.277.654.038</b>	<b>4,14</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.114.252.000	16.180.415.218	94,54	933.836.782	5,46
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	354.780.000	337.380.000	95,10	17.400.000	4,90
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62.000.000	55.083.648	88,84	6.916.352	11,16
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	47.888.302	68,41	22.111.698	31,59
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.718.800	81.665.500	99,93	53.300	0,07
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.000.000	222.101.050	98,71	2.898.950	1,29
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	240.000.000	229.087.090	95,45	10.912.910	4,55
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	79.500.000	99,38	500.000	0,63
9	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.550.000.000	1.543.823.750	99,60	6.176.250	0,40
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000	453.319.243	98,55	6.680.757	1,45
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.000.000	23.866.250	99,44	133.750	0,56
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.172.000.000	1.162.562.809	99,19	9.437.191	0,81
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.129.600	344.216.920	99,16	2.912.680	0,84
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.848.000.000	1.817.011.371	98,32	30.988.629	1,68
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000	39.719.000	56,74	30.281.000	43,26
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	895.000.000	766.635.226	85,66	128.364.774	14,34
17	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.275.000.000	1.266.194.192	99,31	8.805.808	0,69
18	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	945.000.000	938.140.771	99,27	6.859.229	0,73
19	Pengadaan Mebel	289.000.000	286.231.000	99,04	2.769.000	0,96
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	765.153.700	744.284.130	97,27	20.869.570	2,73
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	991.000.000	984.105.076	99,30	6.894.924	0,70
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	679.936.000	662.951.095	97,50	16.984.905	2,50
23	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	109.914.000	99,92	86.000	0,08
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.061.900	315.034.821	99,36	2.027.079	0,64
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	910.000.000	907.247.500	99,70	2.752.500	0,30
<b>TOTAL SETDA</b>		<b>51.522.332.000</b>	<b>46.814.565.081</b>	<b>90,86</b>	<b>4.707.766.919</b>	<b>9,14</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

( Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	SISA ANGGARAN 2023
1	<b><u>PENDAPATAN DAERAH</u></b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD Yang Sah				
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
8					
9	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
10					
11	<b><u>BELANJA DAERAH</u></b>				
12	<b>BELANJA OPERASI</b>				
13	Belanja Pegawai	18.570.732.000,00	17.489.280.444,00	94,18	1.081.451.556,00
14	Belanja Barang dan Jasa	22.856.226.148,00	22.194.596.955,00	97,11	661.629.193,00
15	Belanja Bunga				
16	Belanja Subsidi				
17	Belanja Hibah	8.256.500.000,00	5.347.000.000,00	64,76	2.909.500.000,00
18	Belanja Bantuan Sosial	372.800.000,00	345.800.000,00	92,76	27.000.000,00
19	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>50.056.258.148,00</b>	<b>45.376.677.399,00</b>	<b>90,65</b>	<b>4.679.580.749,00</b>
20					
21	<b>BELANJA MODAL</b>				
22	Belanja Modal Tanah				
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.224.568.852,00	1.205.016.422,00	98,40	19.552.430,00
24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
25	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
26	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	131.105.000,00	124.948.260,00	95,30	6.156.740,00
27	Belanja Modal Aset Lainnya	110.400.000,00	107.923.000,00	97,76	2.477.000,00
28	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.466.073.852,00</b>	<b>1.437.887.682,00</b>	<b>98,08</b>	<b>28.186.170,00</b>
29					
30	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>51.522.332.000,00</b>	<b>46.814.565.081,00</b>	<b>90,86</b>	<b>4.707.766.919,00</b>
31					
32	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>( 51.522.332.000,00)</b>	<b>( 46.814.565.081,00)</b>	<b>90,86</b>	<b>( 4.707.766.919,00)</b>
33					

Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp42.075.591.400</b>	<b>Rp50.056.258.148</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp18.170.312.000	Rp18.570.732.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.200.479.400	Rp22.856.226.148
5 1 05	Belanja Hibah	Rp5.332.000.000	Rp8.256.500.000
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	Rp372.800.000	Rp372.800.000
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp871.820.600</b>	<b>Rp1.466.073.852</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp824.509.600	Rp1.224.568.852
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp47.311.000	Rp241.505.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp42.947.412.000</b>	<b>Rp51.522.332.000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp42.947.412.000)</b>	<b>(Rp51.522.332.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp2.713.670.349
Februari	Rp0	Februari	Rp2.961.481.304
Maret	Rp0	Maret	Rp2.921.264.081
April	Rp0	April	Rp7.183.170.114
Mei	Rp0	Mei	Rp6.844.144.454
Juni	Rp0	Juni	Rp7.531.558.634
Juli	Rp0	Juli	Rp4.164.114.679
Agustus	Rp0	Agustus	Rp3.306.868.604
September	Rp0	September	Rp2.325.340.737
Oktober	Rp0	Oktober	Rp3.918.008.692
November	Rp0	November	Rp5.769.495.316
Desember	Rp0	Desember	Rp1.883.215.033
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp51.522.332.000


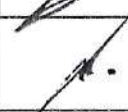
Kajen, tanggal 25 Oktober 2023  
Sekretaris Daerah

**M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197507101999031008


Mengesahkan,  
PPKD

**CASMIDI, S.E., M.Si.**  
NIP. 196504071992031010

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	TRISNO SUHARSANTO, S.E., M.Si.	197307101998031007	KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG	
2.	EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.	197112251998031009	KABAG. ADM. PEMBANGUNAN SETDA	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	SONNY SARWONO, S.E.	198012102006041007	KABID. AP BPKD	



# PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161  
Telp. (0285) 381000 - 381001 Psw. 115 Fax. (0285) 381006 Website  
<http://www.pekalongankab.go.id>

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 000.8.6.3/00001 TAHUN 2024

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114)
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2023;
  - b. mengoordinasikan dan menghimpun capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
  - c. mengolah bahan dan data penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2023;
  - d. melaksanakan updating data capaian kinerja tingkat Pemerintah Daerah ke dalam aplikasi e-SAKIP Tahun 2023;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023;



f. menyusun Dokumen perencanaan lainnya guna peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Umum Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pekalongan  
Nomor : 000.8.6.3/00001  
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si. NIP. 19750710 199903 1 008	Sekretaris Daerah	Ketua
2	WAHYU KUNCORO, S.T., M.T. NIP. 19700418 199703 1 004	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Wakil Ketua
3	ANIS ROSIDI, S.Sos, M.Si. NIP. 19691114 199603 1 005	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Ketua
4	EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng. NIP. 19711225 199803 1 009	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Sekretaris
5	DIAH YUNIARTI, S.T. NIP. 19810605 200604 2 016	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
6	GALUH AJENG HANJAYA, S.E. NIP. 19940928 202012 2 035	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
7	TITIS PURWANING, S.AP NIP. 19810424 201001 2 027	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Setda	Anggota
8	WAHYU ARI YUWONO, S.E. NIP. 19880508 201502 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
9	DAYANTI BUDHI ASTUTI, S.Kom. NIP. 19930427 201502 2 001	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik Bagian Perekonomian Setda	Anggota
10	MUHAMMAD YUSUF, S.M. NIP. 19800408 200502 1 006	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Umum Setda	Anggota
11	INES FIERA WIJAYANTI, S.Sos. NIP. 19950211 202012 2 017	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota
12	TANTI HARINI, S.H. NIP. 19791024 201001 2 010	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
13	RENI NOFIANA DEWI, S.Kom. NIP. 19891113 202012 2 015	Ahli Pertama Pranata Komputer Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
14	ANOM SANYOTO AJI, S.E. NIP. 19860906 201001 1 003	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
  
M. YULIAN AKBAR





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : FADIA ARAFIQ, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

BUPATI PEKALONGAN



FADIA ARAFIQ, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 199903 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Tingkat Kematangan Organisasi (Indeks)	S (34)
		2. Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)	B (67)
2.	Meningkatkan efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	84

**PROGRAM**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian dan Pembangunan

**Jumlah**

**ANGGARAN**

Rp. 35.080.832.000

Rp. 15.176.500.000

Rp. 1.265.000.000

**Rp. 51.522.332.000**

**KETERANGAN**

APBD

APBD

APBD

**APBD**



Kajen, 6 November 2023

PIHAK PERTAMA



**SETDA**  
**M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si.**

Pembina Utama Muda

NRP. 197507310 199903 1 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P.  
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Setda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023



PIHAK KEDUA,

M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si  
NIP. 19750710 199903 1 008

PIHAK PERTAMA

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P.  
NIP. 19690118 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BAGIAN ORGANISASI SETDA  
 KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %
	1.1 Penataan Organisasi	1.1 Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 PROGRAM DAN KEGIATAN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 480.800.000	APBD
1.1 Penataan Organisasi	Rp. 480.800.000	APBD
Jumlah	Rp. 480.800.000	APBD

PIHAK KEDUA  
  
 M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si  
 NIP. 19750710 199903 1 008

Kajen, 6 November 2023

PIHAK PERTAMA



Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P.  
 NIP. 19690118 198903 1 007





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBAGYO, SH. MM

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

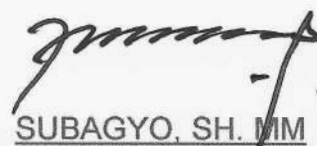
Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

  
SUBAGYO, SH. MM  
Pembina Tk. I

NIP. 19660620 199402 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BAGIAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3	4
1.		1. Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi 2. Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 % 100%
1.1.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.1. Presentase Kegiatan Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang di fasilitasi	100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp. 13.842.500.000,-	APBD
1.1.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 13.842.500.000,-	APBD

Kajen, **6 November** 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,  
 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

*[Signature]*  
**SUBAGYO, SH/MI**  
 Pembina Tk. I

**M. JULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750710 199903 1 008

NIP. 19660620 199402 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUTI HARYATI, S.STP., M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
Setda Kab. Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA  
KABUPATEN PEKALONGAN

TUTI HARYATI, S.STP., M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780308 199612 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b></p> <p>1.1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>1. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>1.1. Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi</p> <p>1.2. Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.610.000.000	APBD
1.1.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.523.998.110	APBD
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.086.001.890	APBD

Pihak Kedua,


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**  


M. YULIAN AKBAR, S.ScS., M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750710 199903 1 008

Kajen, 6 November 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

  
TUTI HARYATI, S.STP., M.Si  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19780308 199612 2 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENURI, S.T., M.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA SETDA  
KABUPATEN PEKALONGAN

ZAENURI, S.T., M.T.  
Pembina  
NIP. 19721027 200604 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Tingkat Kematangan UKPBJ	9 Angka
	1.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.1. Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100%

**NO. PROGRAM DAN KEGIATAN**

1. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
 1.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

**ANGGARAN KETERANGAN**

- Rp 541.000.000 APBD  
 Rp 541.000.000 APBD

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
 SEKRETARIS DAERAH  
 SETDA

Pit. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

M. YULIAN-AKBAR, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 199903 1 008

ZAENURI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19721027 200604 1 010



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUHERMAN, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos. M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kajen, 6 November 2023

**PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN**



**M. YULIAN AKBAR, S.Sos M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA BAGIAN UMUM  
SETDA KAB. PEKALONGAN**



**SUHERMAN SE, MM**  
Pembina  
NIP. 19680910 198903 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN**

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>a. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%
	1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1 Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%
	1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.2 Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%
	1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.3 Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%
	1.4 Kegiatan Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.4 Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
	1.5 Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.5 Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
	1.6 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.6 Prosentase bulan pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%
	1.7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>b. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%
	1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.7 Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		1.8 Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>30.876.032.000</b>	<b>APBD</b>
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.469.032.000	APBD
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.000.000	APBD
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.660.718.800	APBD
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.437.129.600	APBD
1.5	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	895.000.000	APBD
1.6	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.220.000.000	APBD
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.054.153.700	APBD
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.007.997.900	APBD

Kajen, 6 November 2023



**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA BAGIAN UMUM**  
**SETDA KAB. PEKALONGAN**

**SUHERMAN SE, MM**  
Pembina

NIP. 19680910 198903 1 011

**M. YULIAN AKBAR, S.Sos M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 199903 1 008



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITOMO HERLAMBANG, SH  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN  
YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN PEKALONGAN  
  
ADITOMO HERLAMBANG, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680517 198903 1 009



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketercapaian pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100% 100%
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Persentase Pembentukan Produk Hukum dan Publikasinya Sebagai Bentuk Kebijakan Daerah	100% 100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 70.000.000 Rp 70.000.000	APBD APBD
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 528.000.000 Rp 528.000.000	APBD APBD

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua



Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN PEKALONGAN,

*[Signature]*  
ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680517 198903 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN J.



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711225 199803 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BAGIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1. Persentase Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang tersusun 1.1. Presentase Laporan Realisasi Fisik seluruh OPD	100 %
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja 2.1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%  100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp. 222.000.000,-	APBD
1.1.	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 222.000.000,-	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 44.000.000,-	APBD
2.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 44.000.000,-	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 266.000.000,-</b>	<b>APBD</b>

Kajen, 6 November 2023

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

*(Signature)*  
**M. ANJAN AKBAR, S.Sos., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda

*(Signature)*  
**EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.**  
 Pembina Tingkat I

NIP. 19750710 199903 1 008

NIP. 19711225 199803 1 009





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KISTORO, SE, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 199903 1 008

KISTORO, SE, MM.

Pembina

NIP. 19750503 201001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BAGIAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2	3	4
1	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b> 1.1. Administrasi Tata Pemerintahan 1.2. Fasilitas Kerjasama Daerah	1.a. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan b. Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi 1.1. Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan 1.2. Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %  100% 100% 100%

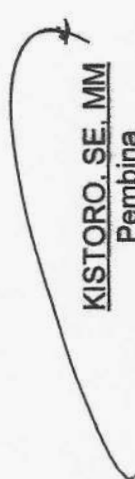
NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Rp. 806.000.000,-	APBD
1.1.	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 676.000.000,-	APBD
1.2.	Fasilitas Kerjasama Daerah	Rp. 130.000.000,-	APBD

Kajen, 6 November 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**  
  
**M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.**  
 PIAL (Pembina Utama Muda)  
 NIP. 19750710 199903 1 008

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**  
**SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

  
**KISTORO, SE, MM**  
 Pembina  
 NIP. 19750503 201001 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETNO SUKIYATININGSIH, SE., M.Ak

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750710 199903 1 008

Plt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

RETNO SUKIYATININGSIH, SE., M.Ak

Penata  
NIP. 19810827 200901 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %
	1.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev	100 %
	1.2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 286.200.000	APBD
	Rp 215.800.000	DBHCHT
1.1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 242.000.000	APBD
1.2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 44.200.000	APBD
	Rp 215.800.000	DBHCHT
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 502.000.000</b>	

Kajen, 6 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750710 199903 1 008

Pt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

**RETNO SUKIYATININGSIH, SE., M.Ak**  
 Penata  
 NIP. 19810827 200901 2 005



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NENI NURHAWATI, SE.  
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan  
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHERMAN SE, MM  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua  
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *6 November* 2023

**PIHAK KEDUA  
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA  
KAB. PEKALONGAN**

**SUHERMAN SE, MM  
Pembina  
NIP. 19680910 198903 1 011**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN  
BAGIAN UMUM SETDA  
KAB. PEKALONGAN**

**NENI NURHAWATI, SE.  
Penata Tk. I  
NIP. 19841210 201001 2 029**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SUBBAG. KEUANGAN**  
**BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Melakukan inventarisasi usulan anggaran belanja Operasi dan Belanja Modal dari Bagian-bagian di Setda.	Jumlah dokumen usulan anggaran belanja dari Bagian yang diinventarisasi.	61 dokumen
2	Merancang anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN Setda	Jumlah Dokumen rancangan anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN Setda	2 Dokumen
3	Memverifikasi dokumen Permintaan pembayaran belanja Operasi dan Modal dari bagian - bagian	Jumlah dokumen belanja Operasi dan Modal yang dapat diverifikasi	800 dokumen
4	Memproses permintaan pembayaran Operasi dan Modal dari bagian - bagian	Jumlah dokumen pembayaran belanja Operasi dan Modal dari bagian - bagian	800 dokumen
5	Menyusun laporan semester dan prognosis	Jumlah laporan semester dan prognosis yang disusun	1 Laporan
6	Menyusun laporan keuangan Setda	Jumlah laporan keuangan setda yang disusun	4 Laporan
7	Melaksanakan penatausahaan keuangan Setda	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang dibuat	12 dokumen
8	Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Setda	Jumlah personil yang mengikuti pembinaan dan dan Fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Setda	10 Personil
9	Melaksanakan sistem pengendalian intern	Jumlah bulan pelaksanaan sistem pengendalian intern	12 bulan

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan setda	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan setda	500 dokumen
11	Menyusun Rencana Kerja Bagian Umum	Jumlah dokumen Rencana kerja yang disusun	2 Dokumen
12	Menyusun Rencana Aksi Bagian Umum	Jumlah dokumen rencana aksi yang disusun	1 dokumen
13	Menyusun Rencana Kerja Tahunan Bagian Umum	Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun	1 dokumen
14	Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bagian Umum	Jumlah dokumen Keterangan Pertanggungjawaban Bagian Umum yang disusun	1 dokumen
15	Menyusun Laporan Evaluasi Rencana Aksi Bagian Umum	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Rencana Aksi Bagian Umum yang disusun	4 dokumen
16	Membuat Laporan kinerja Bagian Umum	Jumlah Laporan kinerja Bagian Umum yang dibuat	1 Laporan
17	Menyusun Laporan evaluasi rencana kerja Bagian Umum	Jumlah dokumen Laporan evaluasi rencana kerja Bagian Umum	4 dokumen
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bulan
19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.114.252.000	APBD
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	895.000.000	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>18.009.252.000</b>	<b>APBD</b>

Kajen, **6 November** 2023

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BAGIAN UMUM SETDA**  
**KAB. PEKALONGAN**



**SUHERMAN SE, MM**  
 Pembina Tk. I

**NIP. 19680910 198903 1 011**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SUBBAG. KEUANGAN**  
**BAGIAN UMUM SETDA**  
**KAB. PEKALONGAN**



**NENI NURHAWATI, SE.**  
 Penata Tk. I

**NIP. 19841210 201001 2 029**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI MURWATI, SH  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Protokol  
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
Setda Kab. Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TUTI HARYATI, S.STP., M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  
Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

Pihak kedua

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN  
SETDA KAB. PEKALONGAN

TUTI HARYATI, S.STP., M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19780908 199612 2 001

Pihak pertama

KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL  
BAGIAN PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN  
SETDA KAB. PEKALONGAN

TRI MURWATI, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19740710 199403 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	4 laporan
2	Penyediaan Dana Penunjang dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang/bulan

**No. SUB KEGIATAN**

- 1 Fasilitasi Keprotokolan
- 2 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

**ANGGARAN KETERANGAN**

- |               |      |
|---------------|------|
| 202.100.000   | APBD |
| 1.086.001.890 | APBD |

Kajen, **6 November** 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. PEKALONGAN**

**KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. PEKALONGAN**



TUTI HARYATI, S.STP., M.Si  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19780308 199612 2001



TRI MURWATI, SH  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19740710 199403 2 001



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WULUNG SARI MEDYARINI, SE  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan,  
Staf Ahli dan Kepegawaian  
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHERMAN SE, MM  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua  
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

**PIHAK KEDUA  
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA  
KAB. PEKALONGAN**

**SUHERMAN SE, MM**  
Pembina  
NIP. 19680910 198903 1 011

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUBBAGIAN TU PIMPINAN,  
STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN  
BAGIAN UMUM SETDA  
KAB. PEKALONGAN**

**WULUNG SARI MEDYARINI, SE**  
Penata  
NIP. 19760828 201101 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN**  
**BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	APBD
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.000.000	APBD
3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.000.000	APBD

4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000	APBD
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	354.780.000	APBD
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62.000.000	APBD
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.848.000.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.172.000.000	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>4.140.780.000</b>	<b>APBD</b>

Kajen, 6 November 2023

PIHAK KEDUA  
 KEPALA BAGIAN UMUM SETDA  
 KAB. PEKALONGAN



SUHERMAN SE, MM  
 Pembina  
 NIP. 19680910 198903 1 011

PIHAK PERTAMA  
 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN,  
 STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN  
 BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN



WULUNG SARI MEDYARINI, SE  
 Penata  
 NIP. 19760828 201101 2 009



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAIMUNAH, SH.  
Jabatan : Kepala Subbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan  
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHERMAN, SE, MM  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 6 November 2023

**PIHAK KEDUA,  
KEPALA BAGIAN UMUM  
SETDA KAB. PEKALONGAN**

**SUHERMAN SE, MM  
Pembina  
NIP. 19680910 198903 1 011**

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUBBAG. RUMAH TANGGA DAN  
PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM  
SETDA KAB. PEKALONGAN**

**MAIMUNAH, SH  
Penata  
NIP. 19730517 199603 2 002**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN  
BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit
10	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit
12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket



NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.550.000.000	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81.718.800	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.000.000	APBD
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	240.000.000	APBD
5	Pemeliharaan Mebel	110.000.000	APBD
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	317.061.900	APBD
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	910.000.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	679.936.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	991.000.000	APBD
10	Pengadaan Mebel	289.000.000	APBD
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	765.153.700	APBD

12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.275.000.000	APBD
13	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	945.000.000	APBD
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.129.600	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>8.726.000.000</b>	<b>APBD</b>

Kajen, 6 November 2023

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA BAGIAN UMUM  
 SETDA KAB. PEKALONGAN



SUHERMAN SE, MM  
 Pembina

NIP. 19680910 198903 1 011

PIHAK PERTAMA,  
 KEPALA SUBBAG. RUMAH TANGGA  
 DAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM  
 SETDA KAB. PEKALONGAN



MAIMUNAH, SH  
 Penata

NIP. 19730517 199603 2 002